



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1184, 2022

BNPB. Rencana Nasional. Penanggulangan
Bencana. Tahun 2020-2024.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka peningkatan tata kelola penanggulangan bencana secara nasional ditetapkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk tahun 2020-2024.

Pasal 2

- (1) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 melaksanakan Fokus Capaian 2020-2024 pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
- (3) Fokus Capaian 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
 - b. terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
 - c. tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
 - d. meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana;
 - e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
 - f. terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
 - g. meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
 - h. meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dan masyarakat terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 - i. terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;
 - j. meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
 - k. terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan

- l. meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan kebijakan nasional penanggulangan bencana tahun 2020-2044.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (3) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 4

- (1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemantauan potensi ancaman bencana yang diperoleh dari kementerian/lembaga terkait;
 - b. penggunaan data indeks risiko bencana; dan
 - c. konsultasi dengan para ahli kebencanaan.
- (2) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan terhadap:
 - a. ancaman bencana geologi;
 - b. ancaman bencana hidrometeorologi; dan
 - c. ancaman bencana nonalam.

Pasal 5

- (1) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. identifikasi akar masalah kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada kawasan berisiko tinggi; dan
 - b. konsultasi dengan para ahli sosial budaya.
- (2) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masih banyaknya penduduk yang berada di kawasan rawan bencana;
 - b. masih terdapat pembangunan di kawasan rawan bencana;
 - c. meningkatnya luas kawasan rawan bencana;

- d. belum optimalnya tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan/investasi penanggulangan bencana; dan
- e. terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi oleh bencana nonalam.

Pasal 6

- (1) Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan hasil pengenalan dan pengkajian ancaman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta hasil pemahaman kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Analisis kemungkinan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatnya risiko bencana geologi;
 - b. meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi;
 - c. meningkatnya risiko bencana nonalam; dan
 - d. meningkatnya kebutuhan terhadap penatakelolaan, perencanaan, dan pembiayaan/investasi penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun untuk mengantisipasi potensi dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
 - b. penguatan tata kelola penanggulangan bencana;
 - c. penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
 - d. peningkatan sarana prasarana dalam pengurangan risiko bencana;
 - e. penguatan sistem kesiapsiagaan bencana;
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - g. peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
 - h. penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana; dan
 - i. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Pasal 8

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. pembuatan perangkat monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024; dan
- b. pembentukan dan/atau optimasi forum kolaborasi nonpemerintah.

Pasal 9

Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f merupakan pelibatan kementerian/lembaga dan unsur nonpemerintah dalam pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana wajib memperhatikan isu lintas sektor yang tidak terbatas pada:

- a. gender;
- b. disabilitas; dan
- c. perlindungan anak.

Pasal 12

Pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana daerah dengan mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Peraturan Badan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 dapat dilakukan kaji ulang.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi dan rekomendasi Sekretariat Pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana; dan/atau
 - b. pertimbangan para pakar kebencanaan.

Pasal 15

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Badan ini diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2020-2024

1. PENGENALAN DAN PENGKAJIAN ANCAMAN BENCANA

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|----|----|----|----|---|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1. Pemantauan potensi ancaman bencana yang diperoleh dari kementerian/lem baga terkait | 1. Pendataan potensi ancaman bencana geologi | 1. Adanya data potensi ancaman bencana geologi | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ESDM ▪ BNPB ▪ BMKG | * | - | - | - | - | |
| | 2. Pendataan potensi ancaman hidrometeorologi | 2. Adanya data potensi ancaman bencana hidrometeorologi | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BMKG ▪ Kemen PUPR ▪ BNPB ▪ Kementerian ▪ KLHK | * | - | - | - | - | |
| | 3. Pendataan potensi ancaman bencana nonalam | 3. Adanya data potensi ancaman bencana nonalam | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkes ▪ BNPB ▪ Kementerian | * | - | - | - | - | |
| | 2. Penggunaan data indeks risiko bencana | 4. Pengumpulan hasil kajian risiko bencana provinsi se-Indonesia | 4. Adanya data kajian risiko bencana seluruh provinsi di Indonesia | 34 provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemendagri | * | - | - | - | - |
| | | 5. Analisis dan penghitungan indeks risiko bencana | 5. Adanya data indeks risiko bencana Indonesia | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | * | - | - | - | - |
| | 3. Konsultasi dengan para ahli kebencanaan | 6. Analisis potensi ancaman bencana | 6. Terlaksananya forum konsultasi untuk mendapatkan masukan terhadap hasil pengenalan dan pengkajian ancaman bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ BMKG ▪ BRIN ▪ BIG | * | - | - | - | - |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|------|--|----------|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappenas ▪ Kemen ESDM ▪ KLHK ▪ Kementan ▪ Kemenkes ▪ Kemen PUPR | | | | | |
| | | 7. Teridentifikasinya tingkat potensi ancaman geologi, hidrometeorologi, dan nonalam | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BMKG ▪ BIG ▪ BRIN ▪ Kemen ESDM ▪ KLHK ▪ Kementan ▪ Kemenkes ▪ Kemen PUPR | * | - | - | - | - |

2. PEMAHAMAN TENTANG KERENTANAN MASYARAKAT

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|--|---|----------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 |
| 1. Identifikasi akar masalah kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada kawasan berisiko tinggi | 1. Identifikasi faktor kerentanan masyarakat | 1. Adanya daftar permasalahan kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat di kawasan berisiko tinggi | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ BMKG ▪ BRIN ▪ Bappenas ▪ Kemensos ▪ Kemperin ▪ KLHK ▪ Kemenkes ▪ Kementerian Desa | * | - | - | - | - |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|--|--|--|----------|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 |
| 2. Konsultasi dengan para ahli sosial budaya | 2. Analisis faktor kerentanan masyarakat | 2. Terlaksananya forum konsultasi untuk mendapatkan masukan terhadap hasil pemahaman kerentanan masyarakat | Nasional | PDDT • BNPB • BMKG • BRIN • BPS • Bappenas • Kemensos • Kemenperin • KLHK • Kemenkes • Kementerian Desa PDDT | * | - | - | - | - |
| | | 3. Teridentifikasinya permasalahan kerentanan masyarakat terhadap ancaman geologi, hidrometeorologi, dan nonalam | Nasional | • BNPB • BMKG • BRIN • BPS • Bappenas • Kemensos • Kemenperin • KLHK • Kemenkes • Kementerian Desa PDDT | * | - | - | - | - |

3. ANALISIS KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|------------------------------|---|---|----------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Pengkajian potensi dampak | 1. Identifikasi faktor risiko prioritas | 1. Adanya daftar faktor risiko prioritas dengan memperhatikan | Nasional | • BNPB • Bappenas | * | - | - | - | - |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|------|--|----------|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| bencana | | hasil pengenalan dan pengkajian ancaman serta pemahaman terhadap kerentanan masyarakat | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BMKG ▪ BPS ▪ BIG ▪ BRIN ▪ Kemen ESDM ▪ KLHK ▪ Kementan ▪ Kemenkes ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenperin ▪ Kemensos ▪ Kementerian Desa PDTT | | | | | |
| | | 2. Adanya kerangka arah pilihan tindakan pengurangan risiko bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BMKG ▪ BIG ▪ BPS ▪ BRIN ▪ Kemen ESDM ▪ KLHK ▪ Kementan ▪ Kemenkes ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenperin ▪ Kemensos ▪ Kementerian Desa PDTT | * | - | - | - | - |

4. PILIHAN TINDAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|---|--|----------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. | 1. Sinkronisasi dan harmonisasi sistem, regulasi dan tata kelola penanggulangan bencana | 1. Adanya penguatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Kemendagri ▪ Bappenas | * | * | * | * | * |
| | | 2. Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BPS | - | - | ** | ** | ** |
| | | 3. Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemen PUPR ▪ BMKG ▪ Kemen ESDM ▪ BRIN ▪ KLHK | - | - | ** | ** | ** |
| | | 4. Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu | - | - | ** | ** | ** |
| | | 5. Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | * | * | * | * | * |
| | | 6. Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pascabencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemendagri | * | * | * | * | * |
| | | 7. Tersusunnya regulasi pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ATR/BPN ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas ▪ KLHK | * | * | * | * | * |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|------|--|---------------------------------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2. Pengintegrasian pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang | | 8. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan <i>master plan</i> kawasan rawan bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ATR/BPN ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 9. Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 10. Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ESDM ▪ Bappenas ▪ BIG | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 11. Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikrozonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan | Nasional (Regional 1, 2, dan 3) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ATR/BPN ▪ Kemen PUPR ▪ Kemen ESDM ▪ Bappenas ▪ BIG | - | - | ** | ** | ** |
| | | 12. Adanya tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis bentang alam (<i>landscape</i>) dan risiko bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas ▪ KLHK | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 13. Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ATR/BPN ▪ Kemendagri ▪ Kemen ESDM ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 14. Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Kemendagri ▪ Kemen ATR/BPN | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|---|---|----------|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana | 3. Peningkatan akses penyebaran informasi bencana | 15. Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional, kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi yang memperhatikan integrasi kewilayahan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappenas ▪ Bappenas ▪ BNPB ▪ Kemen ESDM ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkominfo ▪ Kemenparekrraf/Be kraf ▪ Kemenko Marves ▪ BMKG ▪ BRIN ▪ BIG | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 16. Meningkatkan pengelolaan <i>database</i> dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan <i>database</i> penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BPS ▪ Kemensos ▪ Kemenkominfo | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 17. Terbangunnya Satu Data Bencana terintegrasi | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ BIG ▪ Bappenas ▪ Kemenkominfo ▪ BPS | - | * | * | * | * |
| | | 18. Adanya kemudahan akses informasi melalui <i>database</i> kebencanaan yang mudah digunakan masyarakat | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkominfo ▪ BPS | - | * | * | * | * |
| | | 19. Tersedianya <i>database</i> desa tangguh berdasarkan penilaian | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | ketangguhan desa | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BPS ▪ Kemenko PMK ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemendagri | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 4. Pengintegrasian dan pengarus-utamaan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ke dalam perencanaan pembangunan | 20. Adanya Monev Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 | Nasional | | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 21. Adanya kebijakan pengurangan risiko bencana dalam prioritas pembangunan di daerah | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas | * | * | * | * | * |
| | | 22. Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan penanggulangan bencana daerah | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas | * | * | * | * | * |
| | 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana | 23. Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah | 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 24. Adanya monev, asistensi, dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana | 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 25. Diberikannya bimtek pengintegrasian dokumen terkait penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah | 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 26. Sinkronisasi perencanaan | 514 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | |
|----------|---|--|--------------------------|--|-------------------|----|----|-------|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 24 |
| | | program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana | Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | | | | |
| | | 27. Pemberian Bimtek penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontingensi) yang dimandatkan oleh SPM Sub-Urusan Bencana | 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ POLRI | ** | ** | ** | ** |
| | 6. Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi literasi bencana | 28. Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** |
| | | 29. Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/pelatihan teknis dan simulasi penanggulangan bencana daerah | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 30. Adanya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal | Nasional dan 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Desa PDTT ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 31. Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua <i>stakeholders</i> terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | * | * | * | * |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|---|--|----------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan. | 7. Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan | 32. Adanya sarana dan prasarana pelatihan kebencanaan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | * | * | * | * | * |
| | 8. Pemanfaatan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana | 33. Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | * | * | * | * | * |
| 4. Peningkatan | 10. Pengembangan | 34. Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BRIN ▪ Bappenas | - | - | ** | ** | ** |
| | | 35. Adanya teknologi terapan untuk pencegahan dan mitigasi bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BRIN ▪ BMKG ▪ Bappenas ▪ Kemen ESDM | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 9. Penerapan skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana dengan pendekatan kolaborasi integratif | 36. Adanya teknologi terapan untuk penguatan kapasitas sistem peringatan dini bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BRIN ▪ BMKG ▪ Bappenas ▪ Kemen ESDM | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 37. Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan penanggulangan bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu | * | * | * | * | * |
| | | 38. Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana (<i>risk transfer</i>) dan pembiayaan risiko (<i>risk financing</i>) | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu | * | * | * | * | * |
| | | 39. Adanya peta risiko dan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR | - | ** | ** | - | - |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|-------------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| sarana prasarana dalam pengurangan risiko bencana. | kebijakan kewilayahan untuk ketahanan bencana | rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Kemenhub ▪ KKP ▪ Kemenko Perekonomian ▪ Bappenas | | | | | | |
| | | 40. Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir | 5 Perkotaan Pantura Jawa | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KKP ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemen PUPR | - | ** | ** | ** | ** | |
| | | 41. Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas | - | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 42. Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyenggaraan bangunan gedung dan lingkungan | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KemenPUPR ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 43. Meningkatkan fasilitas penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan | 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BMKG | - | ** | ** | ** | ** | ** |
| 44. Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) | 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ATR/BPN ▪ BIG ▪ KemenPUPR ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BNPB ▪ Bappenas | - | * | * | * | * | * | | |
| 45. Persyaratan analisis risiko bencana untuk pembangunan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | * | * | * | * | * | |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|------|--|---|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 11. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana | | <p>46. Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai</p> <p>47. Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, <i>check dam</i>, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami</p> | <p>- DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan</p> <p>- Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | <p>- Kawasan berisiko tsunami</p> <p>- DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Toba Asahan</p> <p>- Diprioritaskan untuk wilayah sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | <p>48. Terbangunnya infrastruktur sistem drainase utama</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|------|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb) | sungai yang telah memiliki rencana induk ketahanan bencana banjir | | | | | | |
| | | 49. Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, <i>breakwater</i> , dan bangunan pengamanan pantai lainnya | Kawasan pesisir dan pulau kecil terluar | ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas ▪ KKP ▪ Kemenko Marves | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 50. Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana | Diprioritaskan untuk wilayah sungai rawan banjir, tsunami, kawasan pantura Jawa, dan DAS Kritis | ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 51. Adanya pengembangan bandara di daerah terisolasi, perbatasan, dan rawan bencana | Acch, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku | ▪ Kemenhub ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana | 12. Penguatan sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana | | Utara, Papua Barat, Papua, Maluku, NTT. | | | | | | |
| | | 52. Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas | 10 Destinasi Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenparekraf /Bckraf | ** | ** | ** | * | * |
| | | 53. Adanya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman dan <i>data center</i> hidrometeorologi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BMKG ▪ Kemen ESDM ▪ Kemen PUPR ▪ BRIN | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 54. Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen ESDM ▪ Bappenas ▪ BMKG | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 55. Adanya radio tanggap darurat bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LPP RRI ▪ Bappenas ▪ Kemenkominfo | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 56. Adanya hasil Riset Interdisiplin <i>Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS)</i> | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BRIN ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 57. Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BMKG ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 58. Adanya sistem penyediaan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | |
|----------|--|---|---------------------------------|--|-------------------|----|----|-------|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 24 |
| | | data <i>hotspot</i> untuk penanggulangan Karhutla | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappenas ▪ BRIN | | | | |
| | 13. Peningkatan sarana prasarana logistik kebcencanaan | 59. Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik penanggulangan bencana secara optimal | Nasional dan 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 60. Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan penanggulangan bencana secara optimal | Nasional dan 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 61. Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemensos ▪ Kemen PUPR ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 62. Adanya pembentukan dan pembinaan klaster logistik tingkat daerah | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | - | * | * | * |
| | | 63. Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Kemensos ▪ TNI ▪ Polri | - | * | * | * |
| | | 64. Adanya protokol jalur distribusi logistik bebas virus menular | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemenkes ▪ TNI ▪ Polri | - | * | * | * |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana | 14. Penguatan ketangguban bencana berbasis komunitas | 65. Optimalnya penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kementerian Desa PDTT ▪ Kemendagri ▪ Kemensos | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 66. Optimalnya Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendikbud-ristek, ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 67. Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 15. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap lingkungan hidup | 68. Adanya peningkatan kapasitas lembaga/Forum Peduli DAS | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 69. Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla | <p>Acch, Lampung, Jambi, Kep. Riau, Bengkulu, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | | |
|----------|--|--|--|---|-------------------|----|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | | tan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua | | | | | | | |
| | 16. Pelindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pencelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 70. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan pelindungan anak dari eksploitasi di lokasi bencana 71. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/pengurangan risiko bencana/pengembangan komunitas 72. Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat | 34 Provinsi Nasional Nasional | ▪ Kemen PPPA ▪ BNPB ▪ Kemensos ▪ Bappenas ▪ Kemen PPPA ▪ Kemdikbud-ristek. ▪ Kemen PPPA ▪ Kemdikbud-ristek | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 17. Peningkatan peran dan perlindungan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 73. Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana 74. Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana | Nasional dan 34 Provinsi Nasional | ▪ Kemen PPPA ▪ Kemensos ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemen PPPA ▪ Kemensos ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana. | 18. Pengintegrasian hasil kajian risiko bencana ke dalam kajian lingkungan hidup strategis | 75. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PPPA ▪ Kemensos ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 76. Terinisiasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengembangan socio-ekonomi yang inklusif | Gunungkidul, Magelang, Pekalongan | - | * | * | * | - | - |
| | | 77. Terlaksananya penguatan kemitraan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana | Gunungkidul, Magelang, Pekalongan | - | * | * | * | - | - |
| | | 78. Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam penanggulangan bencana dan pengembangan socio-ekonomi yang inklusif | Gunungkidul, Magelang, Pekalongan, Sigi, Donggala | - | * | * | * | - | - |
| | | 79. Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | * | * | * | * | * |
| 19. Restorasi dan pemulihan lahan | 19. Restorasi dan pemulihan lahan | 80. Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah | Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | * | * | * | * | * |
| | | 81. Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut | Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|--------|--|---|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | gambut | provinsi rawan kebakaran hutan | Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. | ▪ BRG | | | | | |
| | | 82. Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat | Acch, Lampung, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Ti- | ▪ KLHK ▪ Bappenas ▪ BRG | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|------|--|---|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | mur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. | | | | | | |
| | | 83. Meningkatkan tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla | Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas ▪ BRG | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---|--|---|----------|--|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20. Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim | Perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim | 84. Adanya penanganan dampaknya terhadap perubahan iklim dan Karhutla | Papua. 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementan ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | 21. Perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim | 85. Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas | ** |
| 22. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove | Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove | 86. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif untuk perlindungan air baku | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 87. Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove | Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove | 88. Dilakukannya penanaman/pengkayaan pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembanguan pertanian yang responsif terhadap risiko bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 89. Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ KKP ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove | Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove | 90. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil | 60 lokasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KKP ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 8. Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana. | 23. Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana | 91. Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove | 34 Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ KLHK ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 92. Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertim-bangkan aspek <i>Sosio Culture</i> yang berkembang di masyarakat | Nasional, 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 93. Adanya Rencana Kontingensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | - | ** | ** | ** | ** |
| | | 94. Terkelolanya infrastruktur penanganan darurat secara optimal | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 95. Adanya penguatan implem-entasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 96. Adanya pemaduan sistem penanggulangan kedaruratan bencana dan sistem penanggulangan krisis kesehatan | Kabupaten/kota terdampak bencana dan DTPK. Prioritas untuk 6 provinsi, 26 kota, 85 kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenkes ▪ Bappenas ▪ TNI ▪ Polri | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 97. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan | Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemensos ▪ Bappenas ▪ TNI | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | |
|----------|--|--|----------------------------------|--|-------------------|----|----|-------|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 24 |
| | | <i>database</i> kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana | | <ul style="list-style-type: none"> Polri | | | | |
| | | 98. Terkelolanya dana bantuan kedaruratan bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> BNPB Bappenas Kemkeu | ** | ** | ** | ** |
| | | 99. Adanya pendampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi | Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> BNPB Bappenas | ** | ** | ** | ** |
| | 24. Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana | 100. Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> BNPP BNPB Bappenas TNI Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 101. Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> BNPP BNPB Bappenas TNI Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 102. Adanya pengerahan potensi dan pengendalian operasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> BNPP BNPB Bappenas TNI Polri | ** | ** | ** | ** |
| | | 103. Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR | 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota | <ul style="list-style-type: none"> BNPP BNPB Bappenas TNI Polri | ** | ** | ** | ** |
| | 25. Pengendalian | 104. Adanya respon peringatan dini | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Polri Kemenkes | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. | 26. Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana | Kejadian Luar Biasa penyakit menular / zoonosis | | ▪ Bappenas | | | | | |
| | | 05. Meningkatkan kapasitas implementasi sistem kekarantinaan kesehatan | Nasional | ▪ Kemenkes ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 06. Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular | Nasional | ▪ Kemenkes ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 07. Terlaksananya promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih | Nasional | ▪ Kemenkes ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 08. Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular | Nasional | ▪ Kemenkes ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 09. Meningkatkan jumlah wilayah hijau pandemi | Nasional | ▪ Kemenkes ▪ Bappenas | - | * | * | * | * |
| | | 10. Terbangunnya infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Hutanra dan Hutanra | Kabupaten/kota terdampak bencana | ▪ Kemen PUPR ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 11. Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana | Kabupaten/kota terdampak bencana | ▪ BNPB ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 12. Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Rawan Bencana | Daerah Tertinggal, Perbatasan terdampak | ▪ Kemendag ▪ Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|--|---|---|---|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | Bencana Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> BNPB Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 27. Penerapan perlindungan sosial yang adaptif | <p>13. Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana</p> <p>14. Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana</p> <p>15. Terdistribusinya bantuan bencana alam /sosial bagi sekolah terdampak bencana</p> <p>16. Adanya dukungan pemulihan sosial ekonomi terdampak bencana</p> <p>17. Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana</p> <p>18. Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana</p> <p>19. Meningkatkan kapasitas ekonomi dan <i>livelihood</i> masyarakat terdampak bencana</p> | Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> Kemensos Bappenas Kemenko PMK | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> Kemendikbud-ristek Bappenas Kemenko PMK | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> BNPB Bappenas Kemenko PMK | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> Kemensos Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | Kabupaten/kota terdampak bencana | <ul style="list-style-type: none"> Kemensos Bappenas Kementerian Desa PDTT Bappenas | ** | ** | ** | ** | ** |

5. PENENTUAN MEKANISME KESIAPAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|--|---|---|----------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Pembuatan perangkat monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 | 1. Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana | 1. Adanya perangkat mekanisme monitoring dan evaluasi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenko PMK ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ Kemendagri ▪ BMKG ▪ Kemen ESDM ▪ KLHK ▪ Kemenkes | * | - | - | - | - |
| | | 2. Tersinkronisasinya perangkat mekanisme money Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dengan perangkat mekanisme monitoring evaluasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenko PMK ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BMKG ▪ Kemen ESDM ▪ KLHK ▪ Kementan ▪ Kemenkes ▪ Kemen PUPR ▪ Kemensos ▪ Kemendagri ▪ Kementerian Desa PDTT | * | - | - | - | - |
| 2. Pembentukan dan/atau optimasi forum kolaborasi nonpemerintah | 2. Optimalisasi peran dan kolaborasi nonpemerintah dalam | 3. Adanya optimalisasi forum kolaborasi nonpemerintah dalam mendukung pilihan tindakan pada Rencana Nasional Penanggulangan | Nasional | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemenko PMK ▪ BNPB ▪ Bappenas ▪ BRIN ▪ Kemen BUMN | * | - | - | - | - |

| KEGIATAN | AKSI | INDIKATOR | LOKUS | ALOKASI TUGAS, KEWENANGAN, DAN SUMBER DAYA | TAHUN PELAKSANAAN | | | | |
|----------|------------------------|-----------|-------|--|-------------------|----|----|----|----|
| | | | | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | penanggulangan bencana | Bencana | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemendagri ▪ Kemenkop UKM | | | | | |

KETERANGAN:

- ** aksi diturunkan dari RPJMN dan RIPB
- * aksi diturunkan dari luar RPJMN namun selaras dengan RIPB
- aksi tidak dilaksanakan

Catatan:

- o Seluruh institusi nonkementerian/lembaga (akademisi, pakar, dan ahli; lembaga usaha, bisnis, dan filantropi; lembaga PBB dan organisasi internasional; organisasi masyarakat sipil; dan lembaga media) dapat berkontribusi dalam pelaksanaan dan pencapaian tiap-tiap aksi dengan mengikutsertakan aturan dan mekanisme yang berlaku.
- o Jumlah provinsi dan jumlah kabupaten merupakan jumlah sebelum dilakukan pemekaran.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

SUHARYANTO